



GENERASI
MELEK
POLITIK

LAPORAN PARTISIPASI POLITIK ANAK MUDA TERHADAP ISU LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT



© Yayasan Partisipasi Muda, 2021

Tim Penulis:

Belinda Sahadati Amri
Arief C. Nugraha
Mita Putri Novita Sari

Penanggung Jawab:

Neildeva Despendya

Desain Tampilan:

Ersa Mauliza

Terimakasih kepada:

Dr. Alfindra Primaldi selaku konsultan dalam riset ini

Informasi Kontak:

admin@partisipasimuda.org

Sekilas Desain Cover:

Apapun pekerjaan kamu, kamu akan tetap terdampak
dari masalah lingkungan yang ada di sekitar mu.
Jadi mulai menyuarakannya ke pemerintah daerah ya!

KATA PENGANTAR

Sebagai organisasi non-profit yang memiliki misi untuk memberikan edukasi politik bagi anak muda (17-25 tahun), Yayasan Partisipasi Muda atau “Generasi Melek Politik” ingin **membangun kesadaran kepada anak muda bahwa politik bisa mempengaruhi kualitas lingkungan hidup kita.**

Apa hubungannya dengan politik? Karena **Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) bisa menentukan nasib lingkungan kita.** Kepala daerah sebagai aktor yang terpilih secara demokratis memiliki kuasa besar untuk membuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan dan juga lingkungan akan sangat bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah.

Hal ini membuat Generasi Melek Politik ingin memberikan kesadaran (*awareness*) kepada anak muda yang tinggal di daerah yang masih memiliki hutan yang luas di Provinsi Gorontalo. Bahwa **bencana alam yang selama ini dialami seperti banjir dan longsor, disebabkan oleh peran pemimpin daerahnya juga, yang asal memberi izin.** Keberlanjutan hutan tidak dipikirkan, sehingga keluarlah izin penggunaan lahan yang morat-marit.

Sebagai anak muda, kita harus memilih kepala daerah atau kepala negara yang “melek” terhadap perlindungan lahan hutan. Agar hutan tidak rusak oleh praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah maupun pejabat pemerintahan lainnya.

Laporan survei ini dibuat untuk memetakan masalah-masalah lingkungan dari mata anak muda di 4 provinsi di Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Riau. Generasi Melek Politik ingin melihat sejauh mana anak muda di 4 provinsi “rawan” tersebut sadar akan permasalahan lingkungan di depannya, yang juga ternyata berkaitan dengan politik. Harapannya, pemetaaan masalah ini bisa digunakan untuk sesama komunitas, non-profit, lembaga riset, ataupun pemerintah, untuk menjadikan perlindungan hutan sebagai prioritas pembuatan kebijakan dan program kerja. Sehingga, siapa pun yang ingin maju sebagai bupati ataupun gubernur ke depan, memprioritaskan perlindungan hutan dan tidak berani melakukan praktik korupsi izin lahan. Generasi Melek Politik

KATA PENGANTAR

ingin masalah ini diketahui sebanyak-banyaknya anak muda di Indonesia, sehingga kita bisa bergandengan tangan untuk memilih dan mengawasi kepala daerah yang sedang memimpin.

Kami sangat berterimakasih atas partisipasi komunitas dan *non-profit organization* di Kalimantan Barat yang telah berkontribusi di pembuatan laporan ini, yaitu: **Trash Hero Chapter Sintang, Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Sintang, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Komunitas Pendaki Kalimantan Barat, Generasi Pesona Indonesia, Seasoldier, Iyale Kalimantan Barat, Bank Sampah, Pipet Kite, Earth Hour Pontianak** dan **Suar Asa Khatulistiwa**.

Semoga laporan ini bisa bermanfaat untuk Indonesia kedepan, agar hutan kita lebih terjaga dan kepala daerah kita lebih “melek” lingkungan.

**DIREKTUR EKSEKUTIF
YAYASAN PARTISIPASI MUDA**

NEILDEVA DESPENDYA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
Daftar Tabel dan Diagram	6
Ringkasan Eksekutif	8
01 PENDAHULUAN	9
Latar Belakang	10
Metodologi Penelitian	11
02 PEMBAHASAN	14
Permasalahan Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	15
Peran Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan Di Provinsi Gorontalo	21
Peran dan Partisipasi Anak Muda Dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	23
03 PENUTUP	29
Kesimpulan	30
Rekomendasi	30
Daftar Pustaka	31

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

Tabel	Tabel 1.1	Persebaran Demografi Responden	12
	Tabel 2.1	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2016-2018	21
Diagram	Diagram 1.1	Minat Anak Muda Terhadap Isu Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	18
	Diagram 1.2	Tingkat Persepsi Anak Muda Terhadap Dampak Masalah Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	20
	Diagram 2.1	Tingkat Persepsi Anak Muda Terkait Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	22
	Diagram 2.2	Tingkat Persepsi Anak Muda Terkait Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	23
	Diagram 3.1	Tingkat Persepsi Terhadap Pelibatan Anak Muda Dalam Penyusunan Kebijakan Lingkungan Di Kalimantan Barat	24
	Diagram 3.2	Tingkat Pelibatan Anak Muda Dalam Penyusunan Kebijakan Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	24
	Diagram 3.3	Tingkat Pengeluaran Aspirasi/ Pendapat Anak Muda Terhadap Isu Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	25
	Diagram 3.4	Pengaruh Aspirasi/Pendapat	26

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

Diagram

	Anak Muda Terhadap Pembuatan Kebijakan Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	
Diagram 3.5	Tanggapan Pemerintah Terhadap Pendapat/Aspirasi Anak Muda Di Provinsi Kalimantan Barat	26

Diagram 3.6	Keterlibatan Anak Muda Dalam Kegiatan Organisasi Yang Terkait Dengan Isu Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	27
-------------	--	----

Grafik

Diagram 3.7	Tingkat Harapan Anak Muda Di Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Pilkada 2020	28
Grafik 1.1	Pengetahuan Anak Muda Terkait Masalah Lingkungan Yang Terjadi Di Provinsi Kalimantan Barat	18
Grafik 1.2	Sumber Informasi Masalah Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	19
Grafik 1.3	Penyebab Masalah Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	19
Grafik 1.4	Dampak Masalah Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	20
Grafik 3.1	Media Yang Digunakan Anak Muda Untuk Menyampaikan Aspirasi/ Pendapat Mereka Terkait Isu Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Barat	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang terkenal, baik secara nasional maupun internasional, dengan kekayaan sumber daya alam dan hayati-nya. Akan tetapi, permasalahan lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat pun banyak terjadi dan dampak dari permasalahan lingkungan pun dialami oleh masyarakat di sana. Salah satunya bencana banjir yang banyak masyarakat Provinsi Kalimantan Barat alami, yang merupakan dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi akibat over eksplorasi sumber daya alam di provinsi tersebut. Dengan melihat besarnya dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, tidak mengherankan jika dari 541 responden anak muda, 100% menyatakan bahwa mereka mengetahui terkait masalah lingkungan di daerah tersebut. Yang mana, 93% responden menyatakan bahwa isu tersebut merupakan isu penting yang harus diperhatikan oleh semua kalangan masyarakat. Untuk permasalahan lingkungan yang paling banyak diketahui oleh responden anak muda adalah sungai yang tercemar (66%), kerusakan hutan (64%), sampah yang menumpuk (63%), banjir (52%) dan pencemaran air (49%). Walaupun sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat, ternyata 46% responden menganggap bahwa upaya yang pemerintah lakukan terbilang biasa saja. Ditambah lagi, 48% responden menyatakan hal yang sama untuk kebijakan

yang sudah pemerintah keluarkan. Mengingat pentingnya peran anak muda dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, ternyata dari 123 responden anak muda, baru 19% responden anak muda yang pernah melakukan hal tersebut. Namun demikian, 28% atau 151 orang responden anak muda menyatakan bahwa diri mereka pernah memberikan pendapat/aspirasinya kepada pemerintah di isu lingkungan dan dari 23 orang responden yang menjawab pertanyaan terkait dampak dari aspirasi/pendapat mereka, 52% merasa bahwa pendapat/aspirasi yang mereka berikan berdampak pada kebijakan lingkungan yang sedang dibentuk. Media yang paling banyak digunakan oleh responden untuk menyuarakan aspirasi/pendapat mereka adalah facebook (44%) dan instagram (32%). Di sisi lain, walaupun partisipasi responden anak muda rendah dalam membentuk kebijakan lingkungan, tercatat dari 124 orang responden yang menjawab pertanyaan terkait tingkat harapan anak muda terhadap pilkada 2020, 112 orang responden (90%) menyatakan bahwa mereka percaya bahwa pelaksanaan pilkada 2020 memberikan ruang bagi anak muda untuk mengeluarkan pendapat/aspirasi terkait isu lingkungan kepada calon kepala daerah dan pembuat kebijakan.

BAB 01

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan wilayah ter-luas kedua di Pulau Kalimantan. Dengan luas wilayah sebesar 147.300.000 ha, wilayah ini memiliki terbagi menjadi 14 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 12 kabupaten Mempawah, Sambas, Ketaang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi, Kayong Utara, Sekadau, Landak, Kubu Raya, dan 2 kota yaitu Pontianak dan Singkawang.

Seperti provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar. Hal tersebut dibuktikan dengan besarnya Kawasan hutan yang berada di provinsi tersebut, yaitu 8,16 juta hektare (2013).¹ Selain itu, mengambil pernyataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sumber daya alam seperti bauksit, kelapa sawit, karet dan kelapa menjadi komoditas yang sangat berkontribusi terhadap pendapat daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan perhatian khusus terhadap sektor sumber daya alam, seperti peningkatan infrastruktur untuk hilirisasi sawit dan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat.²

Namun demikian, pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Barat juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat di provinsi tersebut. Tercatat, pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan mencapai 151,9 ribu hektare di provinsi tersebut. Yang mana, tahun 2019 dinyatakan sebagai tahun dengan jumlah kebakaran hutan dan lahan terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.³ Tidak heran, terdapat 500 masyarakat Kalimantan Barat akhirnya mengajukan gugatan perdata terhadap negara dan perusahaan karena dianggap telah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang masif.⁴

Permasalahan lingkungan lainnya, seperti sampah, pencemaran sungai serta lubang tambang juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan memerlukan perhatian khusus dari semua kalangan masyarakat. Tidak terkecuali pemerintah. Peran pemerintah daerah sendiri sangat penting untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang terjadi di daerahnya, terlebih lagi jika merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

1 Indonesia National Carbon Accounting System, <http://incas.menlhk.go.id/id/data/west-kalimantan/>, diakses 1 Februari 2021.

2 <https://kalbarprov.go.id/berita/kalbar-miliki-potensi-alam-yang-bisa-dikembangkan-guna-menunjang-perekonomian-daerah-dan-nasional.html>, diakses 1 Februari 2021.

3 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, diakses 1 Februari 2021.

4 <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/21/183000165/resah-dampak-karhutla-500-warga-kalbar-ajukan-gugatan-pada-negara?page=all>, diakses 1 Februari 2021

BAB 1 PENDAHULUAN

Selain pemerintah daerah, peran anak muda menjadi sangat krusial dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Tentu saja, sebagai generasi penerus bangsa, suara anak muda tidak dapat diremehkan. Sudah banyak kegiatan anak muda di Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan, baik secara offline maupun online, dengan tujuan menyelesaikan masalah lingkungan yang terjadi di daerah tersebut. Namun demikian, perlu ditinjau secara mendalam, apakah suara dan aspirasi anak muda sudah digunakan dalam menyusun kebijakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat.

“

Sebagai bagian dari program Temu Kandidat yang dilakukan di 5 daerah, Yayasan Partisipasi Muda menyusun laporan yang berjudul **“Partisipasi Politik Anak Muda Terhadap Isu Lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat”**. Di laporan ini, Yayasan Partisipasi Muda akan menyorot masalah lingkungan yang terjadi di provinsi Kalimantan Barat dan kebijakan yang pemerintah daerah buat untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada. Tentu saja, Yayasan Partisipasi Muda akan melihat keterlibatan anak muda dalam pembuatan kebijakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat. Harapan Yayasan Partisipasi Muda, laporan ini dapat membuka mata pembuat kebijakan di daerah tersebut untuk melibatkan anak muda dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang terjadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Laporan ini dibuat dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam proses pengumpulan data, Yayasan Partisipasi Muda tidak hanya melakukan *desk research* namun juga *focus group discussion* dan juga wawancara terhadap para stakeholder di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kemudian data tersebut kami analisis untuk kemudian kami sandingkan bersama dengan kebijakan lingkungan yang sudah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat buat dalam rangka menyelesaikan masalah lingkungan yang terdapat di wilayah tersebut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Jenis Kelamin	Komposisi
Perempuan	52%
Laki-Laki	48%
Umur	Komposisi
17-20	47,5%
21-25	37,5%
26-30	14,2%
>30	0,7%
Latar Belakang Pendidikan	Komposisi
S2	0,7%
S1	29%
SMA	66,1%
SMP	4,1%
SD	0,2%
Bidang Pekerjaan	Komposisi
Mahasiswa/Pelajar	62,1%
Pekerja Swasta	13,1%
Freelancer	9,2%
Wiraswasta	5%
Pengajar (Dosen/Guru)	4,1%
ASN (PNS, BUMN, BUMD, dll)	8,8%
Pegawai	2,2%
Polisi/Tentara	0,0%

TABEL 1.1 PERSEBARAN DEMOGRAFI RESPONDEN

Metode kuantitatif juga digunakan di survey ini dengan menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*⁵ (tidak acak), dengan menyasar responden umur 17-35 tahun dengan jumlah responden yang mengisi survei adalah 1041 responden. Sebanyak 975 responden melanjutkan menjawab

⁵ Teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu

BAB 1

PENDAHULUAN

mengenai isu lingkungan, dengan 913 responden mengetahui masalah lingkungan yang ada di sekitarnya, 62 tidak menjawab. Sebanyak 569 responden memberikan jawabannya pada pertanyaan selanjutnya. Sebanyak 28 responden tidak sesuai dengan usia yang diinginkan, sehingga total responden 541 orang, terdapat 282 responden perempuan dan 259 responden laki-laki.

Jumlah responden pada tiap pertanyaan dalam penelitian ini semakin berkurang seiring dengan jawaban responden. Pada awalnya, terdapat 541 responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan survei. Namun demikian, jumlah tersebut mulai berkurang pada diagram 2.1 dan 2.2 menjadi 124 responden. Hal yang sama juga terjadi pada diagram 3.1 dan 3.2, yaitu 124 dan 123 orang responden. Kemudian, terjadi peningkatan jumlah responden pada diagram 3.3 menjadi 541 responden. Setelah bagian penyampaian aspirasi, jumlah respon berkurang kembali dikarenakan untuk pertanyaan selanjutnya, hanya diambil jawaban dari yang pernah menyuarakan aspirasi, yaitu sebanyak 151 responden (Grafik 3.1) Terjadi juga pengurangan responden karena responden tidak melanjutkan survei hingga selesai, seperti yang terlihat pada diagram 3.6 dan 3.7, dimana jumlah responden yang sebelumnya 151 berkurang menjadi 131 orang.

Survei ini bertujuan menilai pengetahuan serta kepedulian kaum milenial di Provinsi Kalimantan Barat terhadap isu lingkungan dan tingkat partisipasi politik mereka. Jenis pertanyaan terbagi dalam: pilihan ganda (*close-ended*), isian singkat (*short and open-ended*), dan pertanyaan berskala. Survei ini bersifat *non-representative* yang berarti tidak mencerminkan pandangan seluruh anak muda yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. **Oleh karena itu, penggunaan kata anak muda yang terdapat dalam laporan ini merujuk pada anak muda di Kalimantan Barat yang menjadi responden survei.** *Focus group discussion* dan survei tersebut kami lakukan untuk menjawab pertanyaan “**Bagaimana pengetahuan serta kepedulian kaum milenial di Provinsi Kalimantan Barat terhadap isu lingkungan?**” dan “**Bagaimana tingkat partisipasi politik mereka dalam isu lingkungan?**”

BAB 02

PEMBAHASAN

BAB 2 PEMBAHASAN

1. PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Yayasan Partisipasi Muda melihat bahwa isu lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat lebih banyak didominasi oleh sektor kehutanan. Masalah kehutanan seperti deforestasi telah menjadi sorotan masyarakat, lokal maupun nasional. Berdasarkan hasil analisis Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Barat diketahui bahwa rata-rata deforestasi yang terjadi per tahunnya mencapai 68,8 ribu hektare per tahun sedangkan degradasi hutan mencapai 10,8 ribu hektare per tahun.⁶ Salah satu alasan terjadinya deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat adalah pembukaan hutan dan lahan untuk usaha perkebunan, salah satunya kelapa sawit. Terdapat kebun kelapa sawit seluas 1,5 juta hektare di Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit terbesar ialah Kabupaten Ketapang (392 ribu hektare), Kabupaten Sanggau (299 ribu hektare), Kabupaten Sintang (133 ribu hektare), Kabupaten Landak (128 ribu hektare) dan Kabupaten Sekadau (107 ribu hektare).⁷

Perlu diketahui bahwa tidak semua pembukaan hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan. Metode pembakaran dipilih oleh sejumlah pelaku usaha perkebunan dengan asumsi bahwa metode tersebut lebih murah dibandingkan dengan metode lainnya yang tidak melibatkan penggunaan api, seperti land compaction. Pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali menyebabkan berkurangnya luasan hutan yang terdapat di daerah tersebut. Telah diketahui bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdapat sekitar 947 ribu hektare hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Kalimantan Barat.⁸

Akibat dari karhutla yang terjadi, 504.000 orang warga di daerah tersebut mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena menghirup asap kabut. Selain itu, kegiatan belajar mengajar juga dihentikan untuk sementara. Contohnya, seperti yang terjadi di Kota Pontianak. Pada bulan Agustus 2019, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak memutuskan untuk meliburkan kegiatan mengajar di tingkat TK dan SD akibat tebalnya asap kabut yang dihasilkan oleh kebakaran tersebut. Selain itu, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Pol. Didi Haryono menyatakan bahwa selain berdampak pada kesehatan warga, kebakaran yang terjadi juga memberikan dampak buruk terhadap kegiatan ekonomi karena terjadi pembatalan penerbangan baik internasional yang di sebagian pulau besar Indonesia khususnya Sumatra, Jawa

6 <https://kalbarprov.go.id/berita/sekda-kalbar-perlu-perhatian-serius-agar-tingkat-deforestasi-dan-degradasi-hutan-dapat-berkurang.html>, diakses 1 Februari 2021.

7 Presentasi Yayasan Madani Berkelanjutan dalam Diskusi Masa Depan Kalimantan Barat di Era Sawit, Tanggal 8 April 2020, diunduh dari <https://madaniberkelanjutan.id/2020/04/09/masa-depan-kalimantan-barat-di-era-sawit>, pada tanggal 1 Februari 2021.

8 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, diakses 1 Februari 2021.

BAB 2 PEMBAHASAN

dan Kalimantan.⁹

Selain untuk usaha perkebunan, alih fungsi lahan dan hutan di Provinsi Kalimantan Barat juga diakibatkan oleh sektor pertambangan. Bahkan, Gubernur Kalimantan Barat menduga bahwa aktivitas pertambangan bauksit mengakibatkan terjadinya bencana banjir di daerah tersebut. Provinsi Kalimantan Barat memang terkenal dengan hasil pertambangan bauksitnya. Sampai dengan bulan Agustus 2019, hasil produksi bauksit di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 11,6 juta metrik ton. Angka tersebut naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan hasil produksi tahun 2018 yang hanya mencapai 5,6 juta metrik ton. Produksi bauksit tersebut dijual dengan tujuan dalam negeri maupun luar negeri. Selain pertambangan bauksit, pertambangan emas juga dilakukan di wilayah Kalimantan Barat. Namun demikian, pertambangan emas banyak dilakukan tanpa mengantongi izin dari Pemerintah (PETI). Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah mendeteksi 64 lokasi pertambangan emas tanpa izin, yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Aktivitas paling banyak berada di Kabupaten Bengkayang, Ketapang, Landak, dan Sambas.¹⁰

Dampak dari PETI bermacam-macam, mulai dari meninggalnya pekerja tambang karena kecelakaan kerja sampai dengan pencemaran air disebabkan oleh penggunaan zat merkuri untuk pemurnian hasil emas. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup (BPPLH) Provinsi Kalimantan Barat, diketahui bahwa Sungai Kapuas yang mengalir dari kabupaten Kapuas Hulu hingga ke Pontianak sudah tercemar merkuri.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian Universitas Tanjungpura, bersama sejumlah instansi dan Walhi Kalimantan Barat di tahun 2008, menunjukkan bahwa kandungan merkuri (Hg) mencapai 0,2 – 0,4 ppb (parts per billion) atau dua kali lipat dari ambang batas normal.¹² Padahal, sungai tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi, irigasi pertanian, air baku untuk PDAM, tempat rekreasi, hingga menjadi tempat pembuangan limbah domestik. Terlebih lagi, Sungai Kapuas merupakan sungai yang memiliki nilai budaya serta sejarah bagi Masyarakat Kalimantan Barat.

⁹ <https://regional.kompas.com/read/2019/09/28/13542531/kapolda-kalbar-504000-warga-kena-ispa-dampak-asap-karhutla?page=all>, diakses 1 Februari 2021.

¹⁰ <https://www.mongabay.co.id/2015/02/26/penambangan-emas-tanpa-izin-terus-berjalan-meski-memakan-korban-solusinya/>, diakses 1 Februari 2021.

¹¹ <https://www.beritasatu.com/nasional/491390/sungai-kapuas-tercemar-merkuri>, diakses 1 Februari 2021.

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/17/10331232/pencemaran.di.hulu.hingga.hilir>, diakses 1 Februari 2021.

BAB 2 PEMBAHASAN

Tidak hanya masalah penggunaan lahan dan pencemaran sungai, permasalahan sampah juga terjadi di provinsi Kalimantan Barat. Contohnya yang terjadi di Kota Pontianak di mana tercatat bahwa hasil produksi sampah hasil rumah tangga setiap harinya mencapai 300-400 ton di tahun 2018.¹³ Selain produksi sampah yang berlebih, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dalam praktiknya belum efektif mengingat masih banyak infrastruktur yang tidak tersedia/tidak memadai. Mulai dari kurangnya sarana pengangkut sampah, sampai dengan tempat pembuangan akhir yang tersedia. Terlebih lagi ditambah dengan sikap masyarakat yang masih acuh tak acuh dengan permasalahan sampah, seperti yang terjadi di Kabupaten Sintang. Masyarakat yang tinggal di pesisir sungai Kapuas masih memiliki kebiasaan untuk membuang sampah ke sungai tersebut, yang mana selain membuat kotor Sungai Kapuas namun juga membuat banjir rawan terjadi di daerah tersebut.¹⁴

Membicarakan masalah banjir, pada dasarnya, terdapat 3 alasan mengapa banjir dapat terjadi. Pertama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya.¹⁵ Banjir di Provinsi Kalimantan Barat sendiri berkaitan dengan berbagai masalah lingkungan yang terjadi, seperti deforestasi, pemanfaatan ruang yang tidak sebagaimana mestinya dan masalah sampah yang sudah dibahas sebelumnya. Sehingga, daerah tersebut sering mengalami bencana banjir yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satu Kabupaten yang mengalami dampak terbesar dari bencana tersebut adalah Kabupaten Kapuas Hulu. Di bulan September 2020, banjir telah merendam 11 kecamatan di kabupaten tersebut. Jumlah keseluruhan korban jiwa yang terdampak adalah sebanyak 27.788 KK atau 98.649 jiwa. Sedangkan kerugian materiil ada 13.091 unit rumah yang terendam banjir.¹⁶

Dari hasil survei kami terhadap 541 responden anak muda, 100% dari responden menyatakan bahwa mereka mengetahui dan tertarik mengenai masalah lingkungan yang terjadi di daerah mereka Selain itu, mayoritas responden juga menganggap bahwa isu lingkungan merupakan isu yang sangat penting (74%) dan hanya sedikit responden yang beranggapan sebaliknya (6%).

13 <https://www.antaranews.com/berita/772422/dlh-volume-sampah-di-pontianak-400-ton-sehari>, diakses 1 Februari 2021.

14 Focus Group Discussion "Permasalahan Lingkungan dan Partisipasi Politik Anak Muda di Kabupaten Sintang" bersama 10 komunitas anak muda pada tanggal 30 Oktober 2020.

15 Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Jakarta: Direktorat Pengairan dan Irigasi, dalam :http://www.bappenas.go.id/files/5913/4986/1931/2kebijakan-penanggulanganbanjir-di-indonesia_20081123002641_1.pdf, diunduh 1 Februari 2021.

16 <https://mediaindonesia.com/humaniora/346365/bnbp-98649-jiwa-terdampak-banjir-di-kalimantan-barat>, diakses 1 Februari 2021.

BAB 2 PEMBAHASAN

Seberapa Penting Isu Lingkungan Bagi Anda? (N=373)

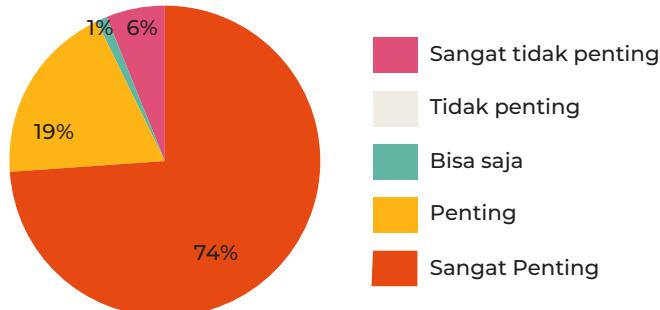
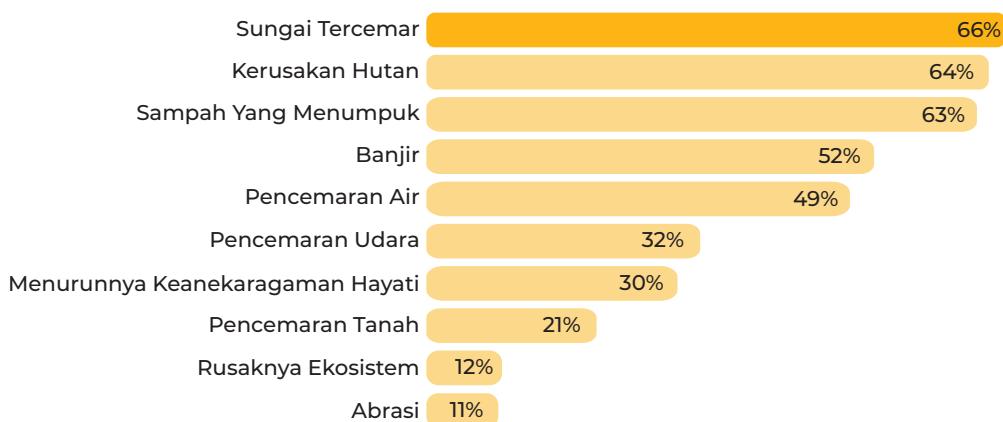


DIAGRAM 1.1: MINAT TERHADAP ISU LINGKUNGAN ANAK MUDA TERHADAP MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Melihat dari grafik 1.1, terlihat bahwa sungai yang tercemar merupakan masalah lingkungan yang paling banyak diketahui oleh responden anak muda di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 66%. Disusul oleh, kerusakan hutan (64%), sampah yang menumpuk (63%), banjir (52%) dan pencemaran air (49%). Semua permasalahan tersebut didukung dengan hasil focus group discussion yang Yayasan Partisipasi Muda lakukan dengan komunitas anak muda di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang, yang menyatakan bahwa masalah deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran Sungai Kapuas dan sampah yang menumpuk sebagai permasalahan lingkungan yang mereka khawatirkan.

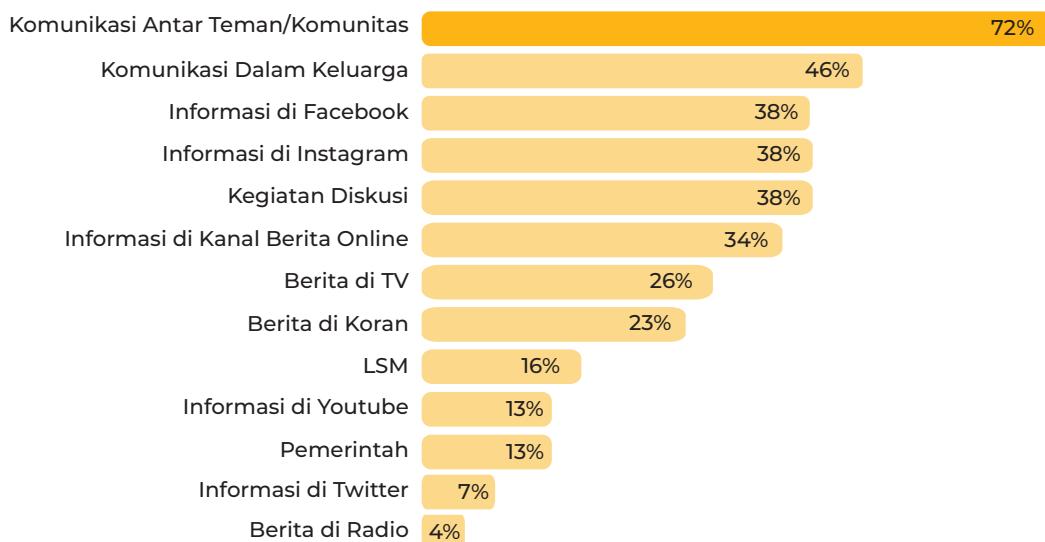
Jika tahu, masalah lingkungan apa yang menurut anda terjadi di daerah anda? (N=541)



GRAFIK 1.1: PENGETAHUAN ANAK MUDA TERHADAP MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB 2 PEMBAHASAN

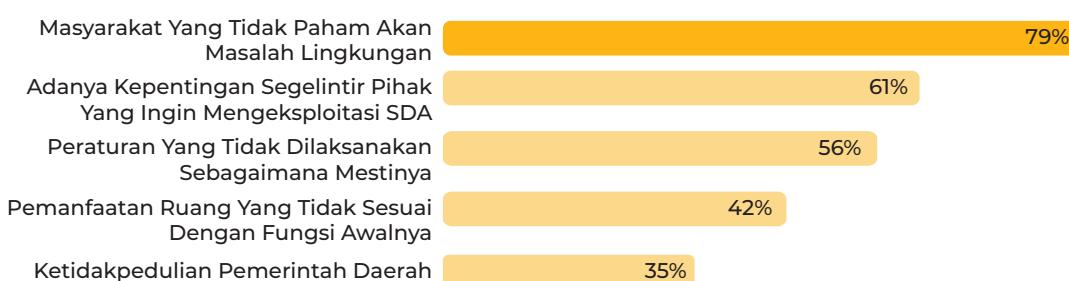
Dari mana anda mengetahui masalah lingkungan yang terjadi di daerah anda?
(N=541)



GRAFIK 1.2: SUMBER INFORMASI MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Responden anak muda mendapatkan informasi terkait masalah lingkungan dari berbagai sumber, yang mana hal ini dapat dilihat dalam grafik 1.2. Digrifik tersebut, terlihat bahwa komunikasi antar teman/komunitas merupakan cara yang paling efektif untuk mendapatkan informasi masalah lingkungan dikarenakan cara tersebut merupakan cara tertinggi bagi responden anak muda mendapatkan informasi terkait lingkungan (72%). Selain itu, sumber lainnya, seperti komunikasi dalam keluarga (46%) dan kegiatan diskusi (38%) menjadi sumber informasi yang banyak digunakan oleh responden survei. Menarik juga untuk melihat bahwa medial sosial seperti facebook (38%) dan instagram (38%) lebih banyak digunakan untuk menjadi tempat mencari informasi terkait lingkungan, jika dibandingkan dengan berita di koran (23%), televisi (26%) dan radio (4%).

Menurut anda apa penyebab utama masalah lingkungan yang terjadi di daerah anda?
(N= 541)



GRAFIK 1.3: PENYEBAB MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB 2 PEMBAHASAN

Masalah lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat terjadi akibat banyak hal. Jika merujuk pada grafik 1.3, responden anak muda menganggap bahwa masyarakat yang tidak paham dengan isu lingkungan merupakan penyebab utama masalah lingkungan terjadi di daerah mereka (79%). Selain itu, eksplorasi sumber daya alam atas kepentingan pihak tertentu (61%) dan tidak dijalankannya peraturan yang ada sebagaimana mestinya (56%) menjadi alasan lainnya.

Apakah anda juga terdampak dengan masalah lingkungan yang terjadi di daerah anda? (N:541)

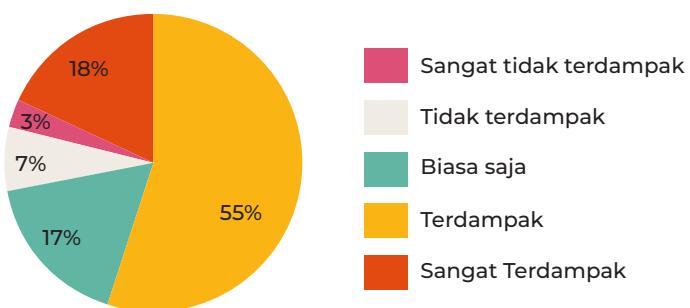
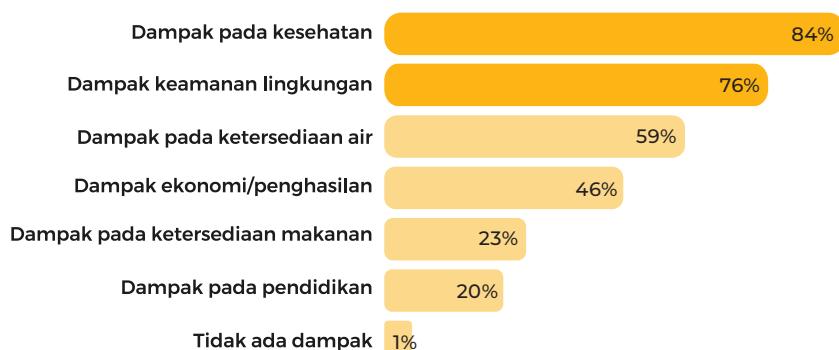


DIAGRAM 1.2: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA TERHADAP DAMPAK MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Masalah lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat ternyata berdampak pada mayoritas responden anak muda, terbukti di diagram 1.2 yang menyatakan bahwa 73% terdampak atas masalah tersebut dan hanya 10% yang menyatakan sebaliknya. Dampak yang dirasakan pun bermacam-macam, namun dampak yang paling banyak dirasakan adalah dampak pada kesehatan (84%), keamanan lingkungan (76%), ketersediaan air (59%) dan ekonomi/penghasilan (46%).

Apakah dampak yang terjadi akibat masalah lingkungan di daerah anda? (N:541)



GRAFIK 1.4: DAMPAK MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB 2 PEMBAHASAN

2. PERAN PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) setiap tahunnya mengeluarkan laporan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, indeks ini juga bertujuan untuk menjadi sumber informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk menghitung IKLH, terdapat 3 komponen yang digunakan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).¹⁷

Tahun					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
68.1	68.3	67.1	66.1	74.17	73.09

TABEL 2.1: NILAI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2013-2018¹⁸

Mulai dari tahun 2013, terjadi peningkatan nilai IKLHK di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6.61 poin. Walaupun kemudian terjadi penurunan poin dari tahun 2017 ke tahun 2018, dapat dikatakan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat membaik. Yang mana, perbaikan kualitas lingkungan tersebut didukung dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pelestarian lingkungan hidup memang menjadi salah satu fokus kerja dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yang salah satu tujuannya adalah untuk melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan.¹⁹ Pemerintah Provinsi Kalimantan barat kemudian mengeluarkan kebijakan turunan dari RPJMN tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah tersebut. Misal, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat. Pada dasarnya, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH tersebut mencakup seluruh wilayah ekoregion dan lautan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan dibentuk oleh Gubernur. Diharapkan dengan adanya RPPLH, pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat bisa

17 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, 2018.

18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

19 Ibid

BAB 2 PEMBAHASAN

mencapai target yang telah ditentukan dalam RPJMD.

Selain membentuk RPPLH, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan. Yang mana, peraturan tersebut dibuat dalam rangka menjaga ketersediaan lahan dan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang berbasis lahan (pertanian, perkebunan dan pertambangan). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahkan mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2020.

Kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk melestarikan dan mengelola lingkungan tidak hanya terhenti di tingkat provinsi saja, namun juga di tingkat kabupaten. Misal di Kabupaten Sintang, sebagai cara untuk mencegah terjadinya karhutla di kabupaten tersebut, dikeluarkan Peraturan Bupati No 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat. Hal ini dikarenakan, di Provinsi Kalimantan Barat, masyarakat mempunyai kebiasaan untuk membakar lahan untuk berladang. Untuk mencegah pembakaran lahan yang tidak terkontrol maka dikeluarkan peraturan tersebut sebagai panduan bagi masyarakat. Atau misal di Kota Pontianak, yang mana untuk menyelesaikan permasalahan sampah, membuat Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse Recycle* (TPS3R) menjadi salah satu solusi dalam menangani sampah yang diproduksi setiap harinya. TPS3R sendiri merupakan sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien.²⁰

Menurut anda, bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan di daerah anda? (N:124)

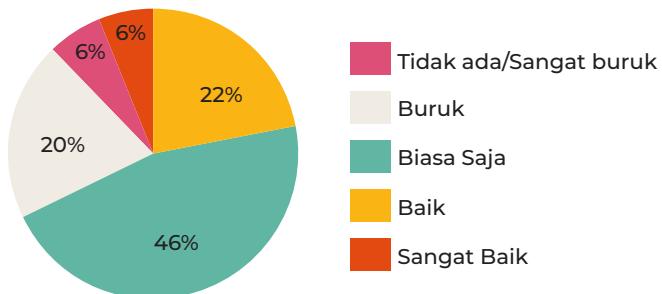


DIAGRAM 2.1: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA TERKAIT UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Namun demikian, responden anak muda memiliki penilaian terhadap upaya dan kebijakan yang telah pemerintah lakukan dalam menangani masalah lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat. Dari 124 responden anak muda

²⁰ <https://www.pontianakkota.go.id/pontianak-hari-ini/berita/TPS3R-Solusi-Tangani-Sampah>, diakses 1 Februari 2021.

BAB 2 PEMBAHASAN

yang memberikan tanggapannya terkait dengan upaya dan kebijakan yang pemerintah lakukan dalam menyelesaikan masalah lingkungan, 46% dan 48% responden menganggap bahwa upaya dan kebijakan yang ada terbilang biasa saja. Sedangkan, hanya 22% dan 19% responden yang menganggap bahwa upaya dan kebijakan yang pemerintah lakukan sudah baik.

Menurut anda bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan lingkungan di daerah anda? (N:124)

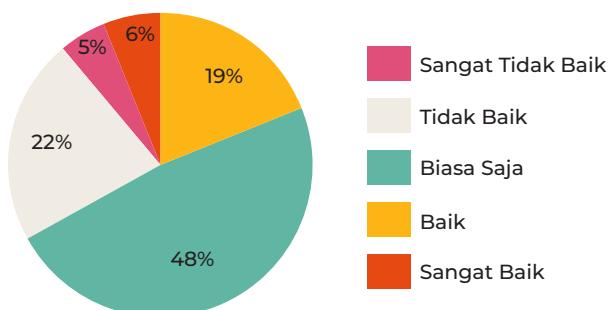


DIAGRAM 2.2: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3. PERAN DAN PARTISIPASI ANAK MUDA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Perumusan kebijakan publik memiliki empat tahapan, tahap pertama adalah perumusan masalah, kedua adalah *setting* agenda kebijakan, ketiga adalah pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, tahapan keempat adalah penetapan kebijakan. Tahapan-tahapan ini memiliki aktor-aktor dalam merumuskan kebijakan, yaitu Lembaga eksekutif, Lembaga legislatif, Lembaga yudikatif, partai politik, kelompok kepentingan dan warga individu.

Warga individu seringkali tidak mendapat porsi yang besar dalam tahapan perumusan kebijakan. Penyaluran aspirasi dari masyarakat secara individu seringkali tidak memiliki ruang dalam tahapan perumusan kebijakan. Dalam konsepsi ini, ruang publik tidak diartikan secara fisik tetapi merupakan ruang sosial yang dihasilkan oleh tindakan komunikatif. Ruang publik menjadi tempat bagi terbentuknya opini publik yang merefleksikan isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Jika dikaitkan dengan partisipasi anak muda dalam pembuatan kebijakan dalam menyelesaikan masalah lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat, Yayasan Partisipasi Muda melihat bahwa lebih banyak responden survei yang menganggap bahwa anak muda hanya terkadang saja dilibatkan dalam penyusunan kebijakan

BAB 2 PEMBAHASAN

lingkungan. Dari 124 responden anak muda, 34% diantaranya menyatakan demikian. Padahal, anak muda sudah seharusnya dilibatkan dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang terjadi di daerahnya. Mengingat permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang berdampak langsung pada kualitas hidup anak muda.

Menurut anda, apakah anak muda cukup dilibatkan dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah anda? (N:124)

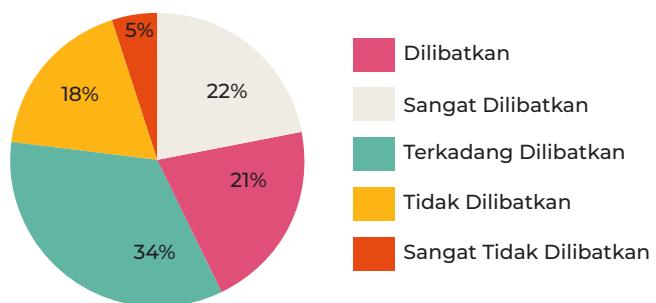


DIAGRAM 3.1: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA TERHADAP PELIBATAN ANAK MUDA DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Apakah anda pernah terlibat dalam menyusun kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di daerah anda? (N:123)

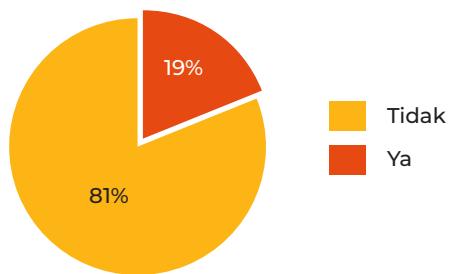


DIAGRAM 3.2: TINGKAT PELIBATAN ANAK MUDA DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Hal ini sebanding dengan jumlah responden yang sudah pernah terlibat dalam penyusunan kebijakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah responden sebesar 105 orang (82%). 23 orang responden menyatakan belum pernah terlibat (18%) dari total 128 responden anak muda yang menjawab pertanyaan tersebut. Yayasan Partisipasi Muda juga menemukan beberapa alasan yang menjadi hambatan bagi anak muda untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat. Salah satunya adalah karena tidak ada wadah untuk bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan lingkungan di daerah. Alasan tersebut membuat anak muda merasa bingung untuk dapat

BAB 2 PEMBAHASAN

terlibat dalam pembuatan kebijakan. Walaupun di beberapa Kabupaten, terdapat wadah bagi masyarakat sipil untuk melakukan hal tersebut. Misal: Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan dari Kabupaten Sintang Lestari. Kurangnya inisiatif anak muda untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan lingkungan juga menjadi alasan lainnya mengapa tingkat pelibatan anak muda rendah. Walaupun sudah terdapat gerakan-gerakan anak muda yang berfokus pada isu tersebut, masih terdapat anak muda yang menunggu “jepput bola” untuk bisa terlibat dalam membuat kebijakan lingkungan. Selain itu, kami juga melihat bahwa sikap pesimis menjadi salah satu hambatan yang dirasakan oleh anak muda. Sikap tersebut sendiri muncul dikarenakan anak muda merasa merasa suara atau aspirasi mereka tidak akan didengarkan oleh pembuat kebijakan.²¹

Akan tetapi, sikap pesimis tersebut tidak menyurutkan responden anak muda di Provinsi Kalimantan Barat untuk menyuarakan suara/aspirasi mereka terkait isu lingkungan kepada para pembuat kebijakan. Jika melihat dari hasil survei yang sudah Yayasan Partisipasi Muda lakukan di Provinsi Kalimantan Barat, tercatat bahwa dari 541 responden, terdapat 159 orang (28%) yang pernah memberikan aspirasinya, 377 orang (70%) yang belum pernah memberikan aspirasinya terhadap isu lingkungan kepada pemerintah dan 13 orang responden yang tidak memberikan jawaban (Diagram 3.3).

Apakah anda pernah menyampaikan aspirasi atau pendapat tentang persoalan lingkungan di daerah anda kepada pemerintah? (N:541)

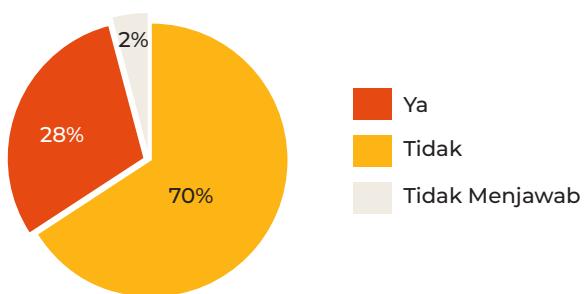


DIAGRAM 3.3: TINGKAT PENGELOUARAN ASPIRASI/PENDAPAT ANAK MUDA TERHADAP ISU LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

²¹ Focus Group Discussion “Permasalahan Lingkungan dan Partisipasi Politik Anak Muda di Kabupaten Kapuas Hulu” bersama dengan 6 komunitas anak muda, 24 September 2020.

BAB 2 PEMBAHASAN

Jika pernah, menurut anda apakah aspirasi dan pendapat anak muda berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di daerah anda? (N:23)

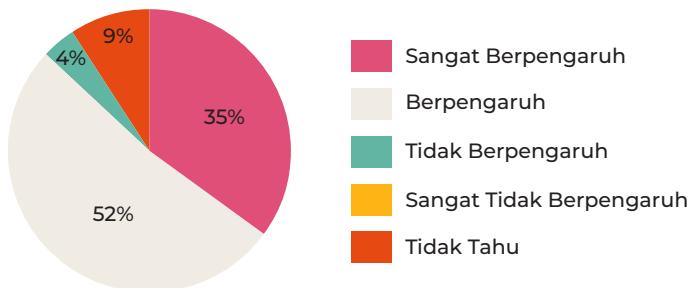


DIAGRAM 3.4: PENGARUH ASPIRASI/PENDAPAT ANAK MUDA TERHADAP PEMBUATAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dari 131 orang responden yang menyampaikan aspirasi mereka, 23 orang responden menyampaikan pengaruhnya kepada pembuat kebijakan. Terdapat 12 orang yang menyatakan bahwa suara/aspirasi mereka berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan (52%), 1 orang responden menjawab tidak berpengaruh (4%) dan 2 orang responden menjawab tidak tahu (9%). Perlu ditelusuri lebih lanjut apakah ada keterkaitan antara tingkat responsif pemerintah setelah mendengar aspirasi/pendapat anak muda dengan keberhasilan responden anak muda dalam memengaruhi kebijakan lingkungan karena melihat dari diagram 3.5, 54% responden menyatakan bahwa pendapat/aspirasi mereka tidak direspon oleh pemerintah.

Apakah pendapat atau aspirasi anda mendapatkan tanggapan dari pemerintah? (N:151)

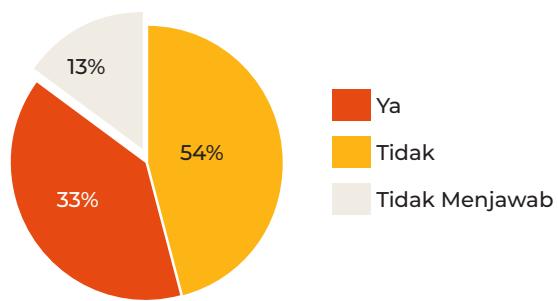
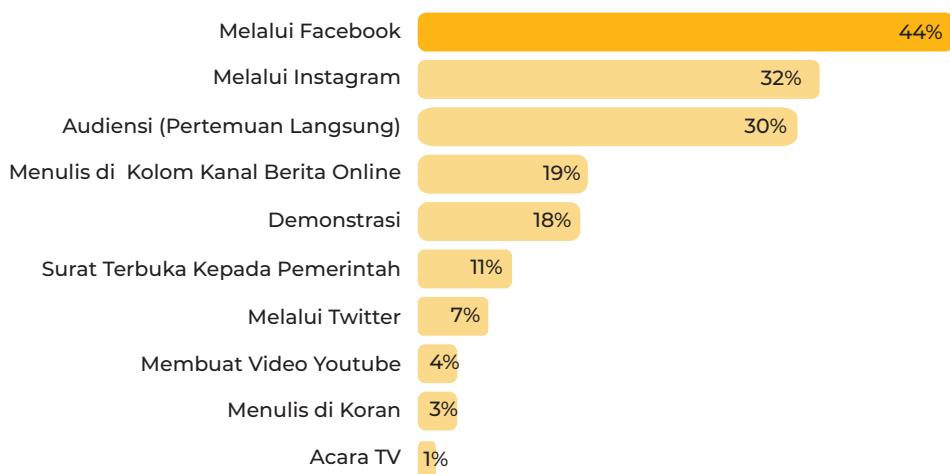


DIAGRAM 3.5: TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPAT/ASPIRASI ANAK MUDA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Aspirasi/pendapat terkait dengan isu lingkungan diberikan kepada pemerintah dengan berbagai cara. Berdasarkan grafik 3.1, facebook telah menjadi kanal yang paling banyak responden gunakan (44%). Diikuti oleh instagram (32%) dan audiensi/pertemuan langsung (30%). Sedangkan cara yang paling sedikit responden gunakan adalah acara TV (1%). Dari grafik tersebut juga dapat kita lihat, walaupun media sosial semakin berkembang, demonstrasi masih merupakan cara yang diminati oleh responden anak muda untuk mengeluarkan aspirasi/

pendapat mereka di isu lingkungan (18%). Walaupun memang cara tersebut akan sulit dilakukan sekarang ini melihat Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19. Sehingga lebih banyak responden yang memilih untuk menggunakan media sosial.

**Jika pernah menyampaikan aspirasi atau pendapat tentang persoalan lingkungan di daerah anda kepada pemerintah, melalui kanal apa saja anda menyampaikannya ?
(Responden yang pernah, N = 151)**



GRAFIK 3.1: MEDIA YANG DIGUNAKAN ANAK MUDA UNTUK MENGELOUARKAN ASPIRASI/PENDAPAT TENTANG ISU LINGKUNGAN DI KALIMANTAN BARAT

Apakah anda pernah terlibat mengikuti kegiatan organisasi yang terkait dengan isu lingkungan? (N:131)

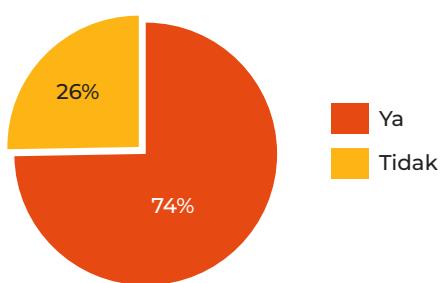


DIAGRAM 3.6: KETERLIBATAN ANAK MUDA DALAM KEGIATAN ORGANISASI YANG TERKAIT DENGAN ISU LINGKUNGAN DI KALIMANTAN BARAT

Kegiatan organisasi lingkungan juga menjadi salah satu alternatif bagi komunitas muda untuk berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat. Tercatat, dari 131 orang responden, terdapat 97 orang responden yang pernah terlibat dalam jenis kegiatan tersebut (74%) dan 34 orang responden yang belum pernah terlibat (26%). Terdapat beberapa contoh yang Yayasan Partisipasi Muda dapatkan terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, kampanye yang dilakukan oleh Earth Hour (Kota Pontianak dan Kabupaten

BAB 2 PEMBAHASAN

Sintang). Organisasi tersebut bersama dengan masyarakat muda lainnya melakukan aksi nyata dengan membersihkan sampah dalam berbagai forum, termasuk World Clean Up Day, yang dilakukan di pesisir sungai. Di Kabupaten Sintang sendiri, kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan 2,8 ton sampah. Upaya ini dilakukan sebagai forum untuk mengedukasi masyarakat dan juga menggerakkan pemerintah untuk lebih fokus di isu sampah.

Kegiatan anak muda untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di Provinsi Kalimantan sendiri pun tidak terbatas bagi komunitas muda yang berdomisili di daerah tersebut saja, karena Himpunan Mahasiswa Provinsi Kalimantan Barat yang sedang menjalankan pendidikannya di Provinsi Yogyakarta pun melakukan hal yang sama. Misal: melakukan demonstrasi sebagai respons terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan juga membuat petisi online kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk segera mengeluarkan solusi atas terjadinya kebakaran tersebut. Akan tetapi, kami juga menemukan bahwa gerakan anak muda di isu lingkungan tidak merata di antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Terbukti dengan minimnya data yang kami dapatkan terkait dengan kegiatan lingkungan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada dasarnya, Yayasan Partisipasi Muda melihat bahwa komunitas muda di Provinsi Kalimantan Barat memiliki harapan yang besar agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi. Tentu saja untuk melakukan hal tersebut, diperlukan pendapat/aspirasi anak muda daerah. Beberapa responden di survei kami menyatakan agar kepala daerah terpilih nantinya lebih responsif terhadap persoalan lingkungan dan menerima aspirasi masyarakat yang luas terkait dengan kebijakan yang berdampak pada lingkungan hidup. Dapat dilihat dari diagram 3.7 bahwa dari 124 responden anak muda yang menjawab pertanyaan dalam diagram tersebut, terdapat 112 orang responden (90%) yang berharap pilkada 2020 dapat membawa perubahan terhadap penyampaian aspirasi anak muda terhadap isu lingkungan.

Menurut anda apakah pemilihan kepala daerah 2020 dapat menjadi peluang bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya terkait isu lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat? (N:124)

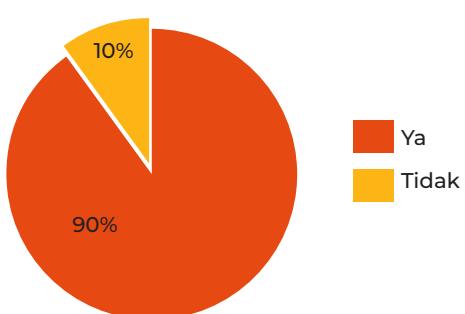


DIAGRAM 3.7: TINGKAT HARAPAN ANAK MUDA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP PILKADA 2020

BAB 03

PENUTUP

BAB 3
PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian anak muda di Provinsi Kalimantan Barat. Responden yang disurvei dalam penelitian ini keseluruhannya menyatakan mereka mengetahui isu lingkungan yang terjadi. Tingginya aspirasi kelompok muda di Kalimantan Barat menunjukkan kesadaran politik yang tinggi terkait dengan isu lingkungan. Apalagi mengingat bahwa generasi muda merupakan penerus yang akan menerima dampak lingkungan dari kebijakan pembangunan yang saat ini berjalan.

Proporsi ini sangat beralasan mengingat berbagai dampak lingkungan seperti kebakaran hutan dan banjir yang selama ini melanda Kalimantan Barat. Dengan perhatian itu, akan tetapi tidak banyak anak muda yang dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung dan terlibat dalam penyusunan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan lingkungan. Sempitnya ruang aspirasi itu tidak menyurutkan semangat muda di Kalimantan Barat untuk menyampaikan aspirasinya, terutama dengan menggunakan media sosial. Anak muda yang menjadi responden juga secara positif mendorong agar pemilihan kepala daerah dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, Yayasan Partisipasi Muda memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan lingkungan yang sedang dibuat maupun yang sudah dibuat kepada kaum muda Provinsi Kalimantan Barat agar anak muda bisa terlibat dalam penyusunan kebijakan dan juga pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Pentingnya bagi pemerintah daerah, untuk tidak hanya melibatkan aspirasi anak muda secara reguler dalam membangun kebijakan lingkungan, atau kebijakan pembangunan yang memiliki dampak pada lingkungan namun juga menjadikan masukan dari anak muda untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
3. Pentingnya bagi kelompok muda untuk membangun komunikasi yang lebih efektif kepada pemangku kebijakan terkait dengan aspirasi isu lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Dibentuknya wadah bagi anak muda Provinsi Kalimantan Barat untuk mengeluarkan aspirasi/pendapatnya terkait dengan isu lingkungan kepada para pembuat kebijakan.
5. Melakukan pendidikan lingkungan kepada anak muda agar kaum muda di Provinsi Kalimantan Barat memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BERITA ONLINE

Andilala. (2018, November 28). DLH: Volume sampah di Pontianak 400 ton sehari. <https://www.antaranews.com/berita/772422/dlh-volume-sampah-di-pontianak-400-ton-sehari>.

Arnani, Mela. (2019, September 21). Resah Dampak Karhutla, 500 Warga Kalbar, Ajukan Gugatan pada Negara. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/21/183000165/resah-dampak-karhutla-500-warga-kalbar-ajukan-gugatan-pada-negara?page=all>.

Bayurini, Diah. (2020, November 19). Sekda Kalbar : Perlu Perhatian Serius Agar Tingkat Deforestasi Dan Degradasi Hutan Dapat Berkurang. <https://kalbarprov.go.id/berita/sekda-kalbar-perlu-perhatian-serius-agar-tingkat-deforestasi-dan-degradasi-hutan-dapat-berkurang.html>.

Kompas.com. (2019, September 28). Kapolda Kalbar: 504.000 Warga Kena ISPA Dampak Asap Karhutla. <https://regional.kompas.com/read/2019/09/28/13542531/kapolda-kalbar-504000-warga-kena-ispa-dampak-asap-karhutla?page=all>.

Madani. (2020, April 8). Presentasi Yayasan Madani Berkelanjutan dalam Diskusi Masa Depan Kalimantan Barat di Era Sawit. <https://madaniberkelanjutan.id/2020/04/09/masa-depan-kalimantan-barat-di-era-sawit>.

Majni, Ferdian Ananda. (2020, September 20). BNPB : 98.649 Jiwa Terdampak Banjir di Kalimantan Barat. <https://mediaindonesia.com/humaniora/346365/bnbp-98649-jiwa-terdampak-banjir-di-kalimantan-barat>.

Pahlevi, Aseanty. (2015, Februari 26). Penambangan Emas Tanpa Izin Terus Berjalan Meski Memakan Korban Solusinya?. <https://www.mongabay.co.id/2015/02/26/penambangan-emas-tanpa-izin-terus-berjalan-meski-memakan-korban-solusinya/>.

Pemerintah Kota Pontianak. (2020, November 18). TPS3R Solusi Tangani Sampah. <https://www.pontianakkota.go.id/pontianak-hari-ini/berita/TPS3R-Solusi-Tangani-Sampah>.

Rinto. (2019, Oktober 17). Kalbar Miliki Potensi Alam yang Bisa Dikembangkan Guna Menunjang Perekonomian Daerah dan Nasional. <https://kalbarprov.go.id/berita/kalbar-miliki-potensi-alam-yang-bisa-dikembangkan-guna-menunjang-perekonomian-daerah-dan-nasional.html>.

DAFTAR PUSTAKA

Saragih, Sahat Oloan, (2018, Mei 7). Sungai Kapuas Tercemar Merkuri. <https://www.beritasatu.com/nasional/491390/sungai-kapuas-tercemar-merkuri>.

FOCUS GRUP DISCUSSION

Focus Group Discussion “Permasalahan Lingkungan dan Partisipasi Politik Anak Muda di Kabupaten Kapuas Hulu” bersama dengan 6 komunitas anak muda, 24 September 2020.

Focus Group Discussion “Permasalahan Lingkungan dan Partisipasi Politik Anak Mudai Kabupaten Sintang” bersama 10 komunitas anak muda pada tanggal 30 Oktober 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

PUBLIKASI

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Jakarta, Direktorat Pengairan dan Irigasi. *Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia*. http://www.bappenas.go.id/files/5913/4986/1931/2kebijakan-penanggulanganbanjir-di-indonesia_20081123002641_1.pdf.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019, November 14). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia*. <https://www.menlhk.go.id/site/single-post/2516/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-2018>.

Karhutla Monitoring Sistem. *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020*. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran.

Indonesia National Carbon Accounting System, <http://incas.menlhk.go.id/id/data/west-kalimantan/>, diakses 1 Februari 2021.

SURVEI

Generasi Melek Politik. 2020. Survey Partisipasi Politik Lingkungan Bagi Anak Muda di Provinsi Kalimantan Barat.

